



## Praktik Akuntabilitas dalam Perspektif Tri Hita Kirana: Studi Etnografi di Pura Pitamaha Palangkaraya

Novita Mayasari Angelia<sup>1</sup>, Agus Satria Wibowo<sup>2</sup>, Nyoman Sudharma<sup>3</sup>, Baitul  
Dawiyah<sup>4</sup>

<sup>1,4</sup> IAIN Palangka Raya, Indonesia

<sup>2,3</sup> Universitas Palangkaraya, Indonesia

e-mail: [malfirza30@gmail.com](mailto:malfirza30@gmail.com)<sup>1</sup>, [assatrya77@gmail.com](mailto:assatrya77@gmail.com)<sup>2</sup>, [insdharna@gmail.com](mailto:insdharna@gmail.com)<sup>3</sup>, [baituldawiyah@gmail.com](mailto:baituldawiyah@gmail.com)<sup>4</sup>

Received 24-01-2024 | Received in revised form 23-02-2024 | Accepted 28-02-2024

### ABSTRACT

*This study aims to explore the practice of financial reporting accountability in Pura Pitamaha, Palangka Raya City based on the tri hita karana perspective. The ethnographic approach with triangulation techniques is used to explore the accounting in social interactions. The results show that vertical accountability and horizontal accountability have been carried out in the practice of financial reporting accountability. This is evident from the existence of financial reporting which states accountability in accordance with generally accepted accounting standards. However, the presentation of financial statements is still not in accordance with PSAK Number 45. Furthermore, based on the tri hita karana, accountability can be interpreted as vertical accountability, namely the relationship between humans and God (parahyangan). Meanwhile, horizontal accountability is defined as the relationship between humans and humans (pawongan) and the relationship between humans and the environment (palemahan).*

**Keywords:** *Accountability, Ethnography, Tri Hita Karana*

### ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi praktik akuntabilitas laporan keuangan di Pura Pitamaha Palangka Raya berdasarkan perspektif *tri hita karana*. Pendekatan etnografi dengan teknik triangulasi digunakan untuk menggali kehidupan akuntansi di dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horisontal telah dijalankan dalam praktik akuntabilitas laporan keuangan. Hal ini tampak dengan adanya pelaporan keuangan yang menyatakan adanya pertanggungjawaban yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Namun demikian, penyajian laporan keuangan masih belum sesuai dengan PSAK Nomor 45. Selanjutnya, berdasarkan *tri hita karana* bahwa akuntabilitas dapat dimaknai sebagai akuntabilitas vertikal yaitu hubungan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*). Sedangkan akuntabilitas horisontal dimaknai dari hubungan manusia dengan manusia (*pawongan*) dan hubungan manusia dengan alam lingkungan (*palemahan*).

**Kata Kunci:** *Akuntabilitas, Etnografi, Tri Hita Karana*

*This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.*



## PENDAHULUAN

Fenomena mengenai pentingnya pelaksanaan akuntabilitas dengan menjalankan prinsip-prinsip *good governance* yang meliputi, transparansi dan rasa keadilan di dalam setiap organisasi harus dicermati oleh setiap organisasi agar organisasi tersebut memperoleh kepercayaan dari para *stakeholder*, serta untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam bentuk penggelapan dana ataupun korupsi. Salah satu kasus terjadinya penggelapan dana atau korupsi yang pernah terjadi pada organisasi nirlaba yaitu pada kasus penggelapan dana jemaat Gereja GKI Serpong, Tangerang Selatan senilai Rp.2,3 miliar yang dilakukan Herry Susanto mantan bendahara umum Majelis Jemaat GKI Serpong dan mantan Pendeta yang terjadi pada tanggal 25 september 2015.<sup>1</sup>

Salah satu cara aplikasi akuntabilitas adalah melalui pelaporan keuangan. Laporan keuangan dalam setiap organisasi, khususnya organisasi kerohanian atau keagamaan menjadi hal yang mutlak untuk dilakukan. Meskipun secara konsep dan filosofi sumber uang dari organisasi keagamaan adalah pemberian "Persembahan" yang telah dilakukan oleh setiap umat dengan ikhlas. Seharusnya, ketika pemberian persembahan telah dilakukan yang diniatkan untuk Tuhan, maka dengan alasan apapun tidak diperlukan sebuah pertanggungjawaban. Namun, hal ini ternyata tidak bisa lagi dilakukan, meskipun itu dalam organisasi kerohanian atau keagamaan. Kodrat manusia diberi kebebasan untuk memilih menjadi orang baik atau buruk<sup>2</sup> telah melahirkan perilaku bias ketika diberi kepercayaan atau tanggung jawab untuk mengelola harta orang lain atau persembahan dalam organisasi kerohanian atau keagamaan.

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. menjelaskan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.<sup>3</sup> Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi,

---

<sup>1</sup> Republika.co.id.(2016).[www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o4p2aj394](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o4p2aj394).

<sup>2</sup> Ahmad Rifai Rif'an. *Hidup Sekali, Bearti, Lalu Mati*. Jakarta: Elex Media Koputindo. (2012).

<sup>3</sup> Mardiasmo. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.(2018).

sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara.

Penelitian tentang akuntabilitas berbasis budaya menarik untuk dilakukan karena akuntabilitas secara konvensional kebanyakan hanya mengedepankan atau menekankan aspek manajerial. Meskipun tujuan dari setiap akuntabilitas tetap sama yaitu kinerja dan pertanggungjawaban. Namun, karena diterapkan dalam jenis organisasi yang berbeda maka penekanan akuntabilitas juga akan menjadi berbeda.

Konsep *tri hita karana* dapat diartikan secara harfiah yang berarti tiga penyebab kesejahteraan, yang mana *Tri* artinya tiga, *Hita* yang artinya sejahtera, dan *Karana* yang artinya penyebab. Pada hakikatnya *tri hita karana* mengandung pengertian tiga penyebab kesejahteraan itu bersumber pada hubungan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*prahyangan*), manusia dengan sesamanya (*paawongan*), manusia dengan alam lingkungannya (*palemahan*).

Berdasarkan penjelasan di atas cerminan akuntabilitas berdasarkan konsep *tri hita karana* dapat dilihat dari seorang manusia hendaknya memiliki *bhakti*, dan *susila* dalam hal ini bagaimana seseorang selalu ingat dengan Tuhannya dan selalu bertingkah laku harus menjunjung dan memenuhi kewajiban antara lain cinta kepada kebenaran, kejujuran, keikhlasan, dan keadilan, selalu bertingkah laku yang baik dengan berkata yang baik, berpikir yang baik, dan berbuat yang baik, serta selalu bertanggung jawab menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.45 menjelaskan bahwa karakteristik organisasi nirlaba berbeda dengan organisasi bisnis, perbedaan utama terletak pada cara organisasi memperoleh sumber daya yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktivitas operasional, organisasi memperoleh sumber daya dari sumbangan anggota dan penyumbang lain yang tidak berharap akan adanya imbalan dari organisasi tersebut, walaupun tidak mengharap adanya imbalan dari organisasi, penyumbang menginginkan adanya pertanggungjawaban dari dana yang telah disumbangkan, dialokasikan untuk kebutuhan dan keperluan apa saja pada organisasi.

PSAK No.45 tahun 2015 mengharuskan organisasi nirlaba membuat laporan keuangan serta melaporkannya kepada pemakai laporan keuangan, diantaranya donatur atau masyarakat, sehingga jika donatur atau masyarakat membutuhkan informasi tidak akan merasa kesulitan untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan organisasi nirlaba. Tujuan dibuatnya laporan keuangan pada entitas nirlaba agar tercipta laporan keuangan yang mudah dipahami, memiliki

relevansi, dan memiliki daya banding yang tinggi, diperlukan penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan organisasi nirlaba agar penyumbang atau masyarakat dapat memperoleh informasi keuangan dengan mudah.<sup>4</sup>

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana praktik akuntabilitas laporan keuangan secara akuntabilitas vertikal dan horizontal berdasarkan aspek *tri hita karana* di Pura Pitamaha Kota Palangka Raya.

Akuntabilitas merupakan salah satu karakteristik yang diperankan oleh organisasi sektor publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas sebagai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan seseorang/badan hukum/ pimpinan kolektif atau organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.<sup>5</sup>

Akuntabilitas terdiri atas dua macam, yakni: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horizontal (*horizontal accountability*). Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi, sedangkan akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat atau lembaga yang setara.

Secara harfiah kata "*Tri Hita Karana*" berasal dari kata "*Tri*" yang artinya "Tiga" kata "*Hita*" bearti "Kesejahteraan" kemudian kata "*Karana*" yang bearti "Sebab". Jadi "*Tri Hita Karana*", memiliki pengertian bahwa ada tiga unsur penyebab manusia mencapai kesejahteraan, kebahagiaan, dan kedamaian. Konsep *tri hita karana* merupakan konsep harmonisasi hubungan yang selalu dijaga masyarakat Hindu Bali yang meliputi: *prahyangan* (hubungan manusia dengan Tuhan), *pawongan* (hubungan

---

<sup>4</sup> Reza Muhammad Rizqi and Nurfadliyah, "PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 (Studi Pada Masjid Al-Iman Bukit Tinggi)," *Jurnal TAMBORA* 4, no. 2 (2020): 23–27, <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2.636>.

<sup>5</sup> Indra Bastian. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga (2010).

antar-manusia), dan *palemahan* (hubungan manusia dengan alam lingkungan) yang bersumber dari kitab suci agama Hindu *Bhagawad Gita*<sup>6</sup>

*Tri hita karana* mempunyai makna bahwa tiga penyebab kesejahteraan manusia dalam rangka mencapai tujuan hidup *moksartham jagadhita ya ca iti dharma* yang pada dasarnya bersumber pada keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia keharmonisan hubungan manusia dengan sesama, keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungan.

Laporan keuangan entitas sektor publik yang bersifat nirlaba merupakan bentuk pertanggungjawaban para pengurus atau pengelola keuangan entitas tersebut yang digunakan sebagai media atau alat untuk memenuhi kepercayaan masyarakat. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba menyatakan tujuan utama laporan keuangan organisasi nirlaba yang sama dengan tujuan laporan keuangan organisasi komersial, yaitu menyajikan informasi yang relevan atas kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh organisasi tersebut. Namun, adanya perbedaan pada isi laporan keuangan dan para pemakai laporan keuangan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan tujuan organisasi. Laporan keuangan organisasi nirlaba menurut PSAK Nomor 45 meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas.

Nirlaba adalah istilah yang biasa digunakan sebagai sesuatu yang bertujuan sosial, kemasyarakatan atau lingkungan yang tidak semata-mata untuk mencari keuntungan materi (uang). Organisasi nirlaba adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal didalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba (moneter). Menurut PSAK No.45 organisasi nirlaba memperoleh sumber daya dari sumbangan para anggota dan penyumbang lain yang tidak mengharapkan imbalan apapun dari organisasi.

Organisasi nirlaba meliputi pura, gereja, masjid, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, asosiasi professional, institute riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah.<sup>7</sup> Dari beberapa pendapat dapat disimpulkan bahwa organisasi nirlaba tidak bertujuan mencari laba akan tetapi murni melayani masyarakat.

---

<sup>6</sup> I Gede, Riana. *Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada IKM Kerajinan Perak di Bali)*. Malang: Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang.(2010).

<sup>7</sup> A. N. M & Pusung. R. J, Tinungki. *Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana*. Jurnal Ekonomi, Vol.2. No.2.(2014)

## METODE

Ditinjau dari basis metodenya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif etnografi, penelitian kualitatif dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.<sup>8</sup> Pendekatan kualitatif memusatkan perhatian pada prinsip – prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan – satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial.<sup>9</sup>

Penelitian etnografi merupakan metode yang tepat untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, dan untuk mendapatkan pandangan mengenai budaya. Penelitian etnografi digunakan dalam mengeksplorasi dan mendeskripsikan kehidupan akuntansi ditengah-tengah interaksi sosial kemasyarakatan.<sup>10</sup> Penelitian etnografi bukan sekedar mengamati tingkah laku manusia, tetapi juga memaknai tingkah laku tersebut yang dibingkai dalam kehidupan keilmuan akuntansi.<sup>11</sup>

Objek pada penelitian ini adalah Pura Pitamaha Kota Palangka Raya. Alasan peneliti menjadikan Pura Pitamaha sebagai objek penelitian adalah karena Pura Pitamaha merupakan Pura terbesar yang ada di Kota Palangka Raya, sehingga akuntabilitas laporan keuangan Pura Pitamaha sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat/umat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pura Pitamaha Kota Palangka Raya merupakan salah satu organisasi nirlaba yang hakikatnya tidak berorientasi untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Pura Pitamaha Kota Palangka Raya sebagai sarana peribadatan dan kegiatan umat Hindu tentunya membutuhkan dana untuk menunjang kegiatan operasional guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sumber keuangan Pura Pitamaha Kota

---

<sup>8</sup> L,J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.(2010)

<sup>9</sup> Famiola,Melia,Bambang, Rudito. *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains.(2008)

<sup>10</sup> J.P Spradley. *The Ethnographic Interview*. Elisabeth M.Z., (Penerjemah) Metode Etnografi. Surabaya: Tiara Wacana Yogya. (1997).

<sup>11</sup> E,G, Sukarhasono. Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Fenomenologi, Grounded Theory, Critical Etnografi, dan Case Study. *Materi Pelatihan Metodologi Penelitian Program A.3. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya*.

Palangka Raya berasal dari sumbangan umat atau donatur dalam bentuk *punia* yang diperoleh dari setiap pelaksanaan persembahyangan maupun kegiatan rutin yang bertempat di Pura Pitamaha Kota Palangka Raya. Sumber pendanaan Pura Pitamaha Kota Palangka Raya berasal dari donatur tidak tetap dan donatur bebas, penerimaan *punia* dari donatur tidak disertai dengan kuitansi sebagai bukti untuk setiap transaksinya. Donatur tidak tetap menunjuk pada lembaga Parisada Hindu Dharma Provinsi Kalimantan Tengah yang memberikan sumbangan atau bantuan dana secara tidak rutin, melainkan hanya pada waktu-waktu tertentu. Donatur bebas dalam konteks ini adalah donatur yang berasal dari mana saja, donatur bebas berasal dari umat yang berasal dari luar kota palangka raya, dan apabila itu di Pura Pitamaha yang menjadi donatur bebas adalah umatnya.<sup>12</sup>

Sumber keuangan Pura Pitamaha Kota Palangka Raya seperti yang telah disampaikan sebelumnya diperoleh dari sumbangan umat berupa *punia* serta bantuan dari lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah. Pemanfaatan dana Pura harus jelas untuk apa dan dimanfaatkan untuk kebutuhan apa saja, agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan pada laporan keuangan yang akan dilaporkan kepada penyumbang atau donatur yang telah menyumbangkan dananya, pemanfaatan dana pura berkaitan dengan kegiatan operasional di pura itu sendiri. Pemanfaatan dana pura digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pura, seperti pelaksanaan persembahyangan yang dilakukan setiap bulan, pelaksanaan upacara *piodalan* serta pelaksanaan upacara hari raya besar Hindu lainnya. Dana tersebut juga dimanfaatkan untuk membayar petugas kebersihan yang rutin di bayar setiap bulannya serta digunakan untuk pelaksanaan upacara ritual kematian apabila ada umat yang meninggal.

Pencatatan keuangan Pura Pitamaha Palangka Raya telah dilakukan setiap adanya transaksi pengeluaran maupun pemasukan, hanya saja pencatatan yang dilakukan oleh pengurus suka duka masih menggunakan pencatatan yang sederhana agar dapat mudah dipahami, baik oleh pengurus Suka Duka maupun oleh umat. Pencatatan yang dipraktikan di Pura Pitamaha masih sangat sederhana yaitu dengan hanya mencatat kas masuk dan kas keluar serta sisa saldo kas. Laporan yang dibuat oleh pengurus suka duka yaitu laporan pelaksanaan perayaan hari Raya Nyepi, dan

---

<sup>12</sup> Kusnida Indrajaya. I Nyoman Arjaan Arta, Yetrie Ludang, "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pasraman Widya Bakti Di Yayasan Pura Pitamaha Kota Palangka Raya," *Journal of Environment And Management* 23 (2022).

Piodalan Pura Pitamaha Palangka Raya, Laporan keuangan suka duka, serta laporan buku kas keuangan duka.

Penyajian laporan keuangan Pura Pitamaha belum sesuai berdasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 45 tentang Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba. Pada PSAK nomor 45, laporan keuangan organisasi nirlaba seharusnya meliputi laporan posisi keuangan, laporan aktivitas, dan laporan arus kas, namun penyajian laporan keuangan yang dibuat pengurus suka duka tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum yaitu berupa buku kas umum, dan laporan aktivitas. Laporan aktivitas pada Pura Pitamaha dinyatakan dalam bentuk laporan yang diberi nama Laporan Pelaksanaan Perayaan Hari Raya Nyepi Dan Piodalan Pura Pitamaha Palangka Raya, dan buku kas umum pada Pura Pitamaha dinyatakan dalam laporan yang diberi nama Laporan Keuangan Suka Duka Pura Pitamaha, dan Laporan Buku Kas Keuangan Duka. Faktor utama penyebab pelaporan keuangan Pura Pitamaha belum sesuai berdasarkan pada PSAK Nomor 45 adalah ketidaktahuan pengurus Suka Duka Pura Pitamaha tentang PSAK Nomor 45.

Akuntabilitas vertikal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada otoritas yang lebih tinggi. Pertanggungjawaban laporan keuangan yang dilakukan pengurus Suka Duka Pura Pitamaha kepada otoritas yang lebih tinggi yaitu pada saat setelah selesainya suatu kegiatan besar seperti *piodalan* (ulang tahun) Pura Pitamaha dan hari raya besar umat Hindu dengan membuat laporan keuangan yang kemudian disampaikan kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Kalimantan Tengah.

Akuntabilitas horizontal merupakan akuntabilitas berupa pertanggungjawaban yang dilakukan kepada masyarakat dalam hal ini umat atau lembaga yang setara. Pertanggungjawaban laporan keuangan yang dilakukan pengurus Pura Pitamaha kepada masyarakat atau umat dilakukan dengan rutin menyampaikan laporan keuangan secara lisan setiap bulan pada saat persembahyangan purnama di Pura Pitamaha Kota Palangka Raya serta melalui grub-grub aplikasi WhatsApp masing-masing tempek.

Berdasarkan aspek *tri hita karena* akuntabilitas vertikal dapat dimaknai dalam dimensi *prahyangan*, dimana pertanggungjawaban manusia dilakukan kepada Tuhan sebagai maha pencipta. Berdasarkan konsep akuntabilitas, bentuk pertanggungjawaban manusia kepada tuhan tidak dapat dilakukan dalam bentuk fisik atau yang dapat dilihat oleh manusia. Bentuk akuntabilitas laporan keuangan



yang dilakukan pengurus suka duka Pura Pitamaha dilakukan atas dasar keimanan (*sraddha*) dan ketakwaan (*bhakti*). Keimanan dalam hal ini berarti keyakinan akan keberadaan Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur alam semesta beserta isinya, sedangkan ketakwaan artinya sujud dan cinta kepada Tuhan. Pengurus suka duka mengelola keuangan dengan didasari keyakinan atas keberadaan Tuhan dan akan menimbulkan kesadaran pengurus suka duka untuk mentaati serta mematuhi ajaran agama Hindu yang benar. Bhakti yang diwujudkan oleh pengurus suka duka dalam hal ini ialah dengan melakukan pengabdian kepada sesama makhluk ciptaan Tuhan dengan melaksanakan amanah yang telah diberikan dalam bentuk kerja, karena kerja di dalam ajaran agama Hindu dianggap sebagai sebuah pengorbanan.<sup>13</sup>

Pelanggaran terhadap aturan akuntabilitas akan menghasilkan sanksi yang bersifat profan (duniawi) dan sakral (surgawi). Contoh sanksi profan adalah diperlakukan hukum sesuai Undang-Undang Republik Indonesia yang berlaku atas pelaksanaan pengurus suka duka Pura Pitamaha yang merugikan umat seperti penyewelengan dana umat. Sedangkan sanksi yang bersifat sakral bagi pengurus suka duka yang melakukan penyimpangan berupa dosa dan tindakan ini nantinya akan dipertanggungjawabkan secara pribadi kepada Tuhan.

Akuntabilitas horizontal berdasarkan aspek *tri hita karana* yakni dalam dimensi *paawongan* dan *palemahan*. Di dalam dimensi *paawongan* hubungan harmonis manusia dengan sesama manusia dilaksanakan pengurus suka duka dengan mempertanggungjawabkan dana/*punia* yang diperoleh dari umat untuk memberikan kontribusi untuk umat pula, yakni dengan melaksanakan upacara yang ada dipura, seperti untuk upacara persembahyangan dan upacara kematian, yang berorientasi pada pelayanan untuk umat.<sup>14</sup>

Akuntabilitas horizontal dalam dimensi *palemahan* hubungan harmonis manusia dengan alam lingkungan dilaksanakan pengurus suka duka dengan melaksanakan upacara *caru* yang memiliki makna untuk mengharmoniskan alam beserta seluruh isinya yang bersifat timbal balik antara manusia dan alam yang diciptakan oleh

---

<sup>13</sup> Eko Setyanto and Hamzah Ritchi, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Atas Kompetensi Aparatur, Kualitas Software SIA Penerapan SPI Dan Penerapan SAP Pada Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. April (2018): 89–105.

<sup>14</sup> Nelcie Patibang, "MAKNA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMUNITAS DANCE COVER (Studi Pada Komunitas Dance Cover White Family Samarinda)," 2022.

Tuhan, serta menjaga dan memelihara lingkungan di sekitar lingkungan Pura Pitamaha dengan melaksanakan kerja bakti setiap hari minggu seminggu sebelum persembahyangan purnama.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil analisis dan pembahasan sebelumnya maka simpulan yang didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber pendanaan Pura Pitamaha berasal dari donatur tidak tetap dan donatur bebas, hanya saja penerimaan dana tidak disertai dengan kuitansi yang berguna sebagai bukti untuk setiap transaksi penerimaan. Donatur tidak tetap menunjuk pada lembaga Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, donatur bebas dalam konteks ini adalah donatur yang berasal dari mana saja. Pemanfaatan dana pura digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada di pura, seperti pelaksanaan persembahyangan, pelaksanaan upacara *piodalan*, serta pelaksanaan upacara hari raya besar umat Hindu lainnya
2. Pelaksanaan akuntabilitas laporan keuangan di Pura Pitamaha Palangka Raya berjalan cukup baik dibuktikan dengan adanya laporan keuangan yang telah dibuat pengurus Suka Duka yang menyatakan adanya pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan tersebut, hanya saja penyajian laporan keuangan yang dibuat pengurus Suka Duka Pura Pitamaha belum sesuai dengan PSAK No.45 namun pelaporan keuangan yang dibuat pengurus suka duka tetap sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum.
3. Pelaksanaan akuntabilitas vertikal yakni pertanggungjawaban pengurus Suka Duka Pura Pitamaha kepada otoritas lebih tinggi dilaksanakan dengan membuat laporan keuangan pelaksanaan perayaan hari raya nyepi dan piodalan pura pitamaha dan menyampaikannya kepada Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah setelah selesainya suatu kegiatan atau upacara di Pura Pitamaha seperti pelaksanaan *piodalan* serta hari raya Nyepi setiap tahunnya. Pelaksanaan akuntabilitas vertikal dalam dimensi *prahyangan* didasarkan pada keyakinan bahwa keberadaan Tuhan sebagai "sang pencipta, pemelihara, dan pelebur" alam semesta beserta isinya. Disamping itu pengurus Suka Duka Palangka Raya meyakini bahwa bekerja merupakan suatu pengorbanan (*yadnya*) serta melaksanakan *ngayah* yang artinya semua kerja dikehidupan merupakan suatu persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal yakni pertanggungjawaban kepada pihak yang setara dilaksanakan dengan membuat laporan keuangan suka duka yang

rutin disampaikan secara lisan kepada umat pada saat persembahyangan purnama setiap bulannya, serta melalui grup-grup aplikasi WhatsApp masing-masing tempek. Pelaksanaan akuntabilitas horizontal Pura Pitamaha Palangka Raya dalam dimensi *pawongan* berorientasi kepada pemberian pelayanan kepada umat Hindu. Pura Pitamaha sebagai entitas nirlaba keagamaan yang berorientasi kepada pemberian pelayanan harus bertanggungjawab terhadap sumber daya yang digunakan kepada pemberi amanah yakni umat. Dalam hal ini pelayanan yang diberikan Suka Duka Pura Pitamaha Palangka Raya yakni dengan melaksanakan upacara-upacara, seperti persembahyangan yang dilakukan rutin setiap bulan, upacara *piodalan* Pura Pitamaha, upacara hari raya besar, serta melaksanakan upacara kematian.

5. Akuntabilitas horizontal Suka Duka Pura Pitamaha dalam dimensi antara manusia dengan alam lingkungan (*pawongan*), pengurus pitamaha melakukan upacara *caru* yang mempunyai makna untuk menyelaraskan atau mengharmoniskan alam semesta beserta seluruh isinya, yang dilaksanakan pada saat *piodalan* Pura Pitamaha Palangka Raya serta pada saat hari raya Nyepi setiap tahunnya. Selain itu pengurus Suka Duka Pura Pitamaha rutin melaksanakan kerja bakti setiap hari minggu seminggu sebelum persembahyangan purnama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Basrowi & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bastian, Indra. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bungin, Burhan. (2009). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Departemen Agama R.I. (1993). *Sarasamuccaya dengan teks Bahasa Sanskerta dan Jawa-Kuna*. Jakarta: Penerbit Hanuman Sakti.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2015). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 45 Revisi Tahun 2015 Tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba*. Jakarta: Dewan Standar akuntansi Keuangan.
- I Nyoman Arjaan Arta, Yetrie Ludang, Kusnida Indrajaya. "Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen Dalam Pengelolaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Pasraman Widya Bakti Di Yayasan Pura Pitamaha Kota Palangka Raya." *Journal of Environment And Management* 23 (2022).
- Kholil, Syukur. (2006). *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: Cita Pustaka Media
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Moleong, L, J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Rizqi, Reza, and Nurfadliyah. "PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN ORGANISASI NIRLABA BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) NOMOR 45 (Studi Pada Masjid Al-Iman Bukit Tinggi)." *Jurnal TAMBORA* 4, no. 2 (2020): 23–27. <https://doi.org/10.36761/jt.v4i2.636>.
- Purhantara, Wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Republika.co.id.(2016). [www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o4p2aj394](http://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/o4p2aj394).
- Riana, I Gede. (2010). Dampak Penerapan Kultur Lokal Tri Hita Karana terhadap Orientasi Kewirausahaan dan Orientasi Pasar serta Konsekuensinya pada Kinerja Usaha (Studi pada IKM Kerajinan Perak di Bali). Malang: *Disertasi Program Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang*.
- Rif'an, Ahmad Rifai. (2012). *Hidup Sekali, Bearti, Lalu Mati*. Jakarta: Elex Media Koputindo.
- Rudito, Bambang & Melia, Famiola. (2008). *Social Mapping: Metode Pemetaan Sosial*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Setyanto, Eko, and Hamzah Ritchi. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah (Survey Atas Kompetensi Aparatur,

- Kualitas Software SIA Penerapan SPI Dan Penerapan SAP Pada Pemerintah Daerah Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Jawa Barat)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi* 9, no. April (2018): 89–105.
- Sukarhasono, E.G. (2006). *Alternatif Riset Kualitatif Sains Akuntansi: Biografi, Phenomenologi, Grounded Theory, Critical Ethnografi, dan Case Study. Materi Pelatihan Metodologi Penelitian Program A.3. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.*
- Spradley J.P. (1997). *The Ethnographic Interview*. Elisabeth M.Z., (Penerjemah) *Metode Etnografi*. Surabaya: Tiara Wacana Yogya.
- Tinungki, A. N. M & Pusung. R. J. (2014). Penerapan Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan PSAK No.45 Pada Panti Sosial Tresna Werdha Hana. *Jurnal Ekonomi*, Vol.2. No.2.
- Patibang, Nelcie. "MAKNA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN KOMUNITAS DANCE COVER (Studi Pada Komunitas Dance Cover White Family Samarinda)," 2022.